

Pengaruh Penerapan *E-procurement*, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dimoderasi Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung

Andi Sopyan¹, Firdaus Amyar², Bambang Pamungkas³
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Indonesia

andi.sopyan@bpk.go.id¹, firdaus.amyar@ibik.ac.id², pamungkas62@yahoo.com³

Kata Kunci:

Pengadaan Elektronik, Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, Pencegahan Penipuan, Sistem Pengendalian Internal.

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana umum. Dalam pelaksanaannya sering terjadi kecurangan, dan hal ini mengindikasikan bahwa instansi pemerintah kabupaten/kota rentan terhadap kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kecurangan tersebut, diantaranya melalui penerapan *E-procurement*, akuntansi forensik, audit investigasi, dan sistem pengendalian intern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-procurement*, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh akuntansi forensik terhadap pencegahan kecurangan. Penulis melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan *E-procurement*, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh *E-procurement*, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung.

Key Word:

E-procurement, Forensic Accounting, Investigative Audit, Fraud Prevention, Internal Control System.

Abstract

Procurement of government goods and services is needed to Support the implementation of government activities in building public facilities and infrastructure. In its implementation, Fraud often occurs, and this indicates that district/city government agencies are vulnerable to Fraud in the procurement of government goods/services. Efforts are needed to overcome this Fraud, including through the implementation of *E-procurement*, forensic accounting, investigative audits, and internal control systems. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of *E-procurement*, forensic accounting, and investigative audits on Fraud prevention. Also to determine the effect of the internal control system can moderate the effect of forensic accounting on Fraud prevention. The author conducted research in the Bandung City Regional Government. The results of the study concluded that there was a positive and significant effect of *E-procurement*, forensic accounting, and investigative audits on Fraud prevention. The results of the study also showed that the internal control system can moderate the effect of *E-procurement*, forensic accounting, and investigative audits on Fraud prevention in the procurement of goods/services in the Bandung City Government.

Copyright © 2024 Andi Sopyan, Firdaus Amyar, Bambang Pamungkas
This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan guna menunjang operasional instansi pemerintah dalam rangka menumbuhkan pembangunan Indonesia. Ditinjau dari berbagai sudut pandang, pembangunan Indonesia tidak lepas dari perolehan barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa memegang peranan penting di sektor pemerintahan yang dapat dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, sehingga tidak jarang oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan proses perolehan barang dan jasa untuk melakukan tindakan kecurangan (*Fraud*) (Astuti & Prabowo, 2023).

Secara nasional, Indonesia telah lama menghadapi masalah korupsi dan *Fraud* di sektor publik, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Indonesia, hasil survey yang dilakukan oleh ACFE mengungkapkan bahwa jenis *Fraud* corruption atau jenis *Fraud* korupsi merupakan jenis

kecurangan (*Fraud*) yang paling banyak terjadi (*Fraud* korupsi sebesar 64,4%), artinya 50% lebih mayoritas jenis *Fraud* yang terjadi di Indonesia adalah korupsi, disusul oleh penyalahgunaan asset atau asset misappropriation sebesar 28,9%, dan *Fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE, 2020). Sehingga, berdasarkan hasil survey tersebut, Indonesia selayaknya berkewajiban untuk mengurangi kasus korupsi dari peringkat korupsi yang sangat tinggi menjadi rendah dan lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Berkembangnya kasus *Fraud* yang terjadi Indonesia juga sudah selayaknya menjadi perhatian peneliti agar dapat memberikan kontribusi positif yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi anti *Fraud* di Indonesia (Munadi, dkk., 2022).

Selanjutnya, Kota Bandung salah satu kota di Indonesia yang jumlah kasus korupsi dan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa lumayan banyak. Berikut rincian jumlah kasus korupsi dan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung rentang waktu Tahun 2021-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi dan *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kota Bandung Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Kasus <i>Fraud</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa	Tindakan Hukum yang Diambil
2021	15	10	5
2022	20	12	7
2023	18	9	4

Sumber: BPS Kota Bandung (2024)

Tabel 1. menggambarkan perkembangan kasus korupsi dan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di Kota Bandung selama periode tiga tahun terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, terlihat adanya variasi dalam jumlah kasus yang dilaporkan atau terdeteksi. Pada tahun 2021, tercatat 15 kasus korupsi, dengan 10 di antaranya terkait dengan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa. Angka tersebut meningkat menjadi 20 kasus korupsi pada tahun 2022, sementara kasus *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa mencapai 12 kasus. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus korupsi turun menjadi 18, dengan 9 kasus terkait *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah kasus, masih terlihat adanya masalah yang perlu ditangani secara serius. Tindakan hukum telah diambil sebagai respons terhadap kasus-kasus tersebut, mencakup penyelidikan, penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Meskipun demikian, data ini menyoroti perlunya upaya terus-menerus dalam mencegah dan menangani korupsi serta *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Implementasi *E-procurement* telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik. *E-procurement* merujuk pada penggunaan teknologi informasi, khususnya internet dan sistem informasi digital, untuk melakukan transaksi pengadaan secara elektronik. Praktik ini menjadi semakin penting karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *E-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Banggai (Yusni, 2022). Implementasi *E-procurement* di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa implementasi *E-procurement* dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini memberikan dorongan bagi pemerintah dan organisasi publik untuk mempercepat adopsi teknologi ini dalam upaya menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih transparan dan efisien (Safitri, dkk., 2024). Namun, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Astuti & Prabowo (2023) yang menyimpulkan bahwa implementasi *E-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Semarang.

Akuntansi forensik merupakan bidang yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kecurangan atau *Fraud*. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di sektor publik, akuntansi forensik memiliki peran yang sangat penting. Praktik ini tidak hanya terbatas pada pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga melibatkan identifikasi pola-pola *Fraud*, pengumpulan bukti, dan penyajian laporan investigasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi forensik dapat secara signifikan membantu dalam mencegah dan mendeteksi *Fraud*, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa (Rani, dkk., 2024). Begitu juga dengan penelitian Prasetyo, dkk. (2023) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik dapat mendeteksi terjadinya *Fraud*.

Audit investigasi merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dengan dugaan *Fraud* atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di sektor publik, audit investigasi memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas dan transparansi. Penelitian

terdahulu banyak mengungkapkan bahwa banyak kasus *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan daerah, dan salah satu upaya untuk mengungkapkan adanya *Fraud* tersebut adalah melalui audit investigatif (Ningrum, dkk., 2024). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa salah satu alat yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pengungkapan *Fraud* adalah audit investigative yang terbukti memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap kasus *Fraud* yang terjadi di PT Waskita dan Wijaya Karya, perusahaan BUMN yang banyak menangani berbagai proyek pemerintah (Ulfani & Ernawati, 2024).

Pencegahan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa dengan sistem pengendalian internal merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko penipuan dalam proses pengadaan dengan menerapkan kontrol internal yang kuat. Proses pengadaan barang dan jasa sering menjadi sasaran potensial untuk praktik penipuan karena melibatkan transaksi yang besar dan kompleks. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud*. Pengadaan barang/jasa pada pemerintah banyak dilakukan oleh perusahaan BUMN/BUMD, seperti yang dilakukan oleh Telkom Corporate University salah satu unit PT. Telkom Indonesia. Sistem pengendalian internal yang dilakukan perusahaan terbukti mampu untuk mencegah terjadinya *Fraud* (Ainun & Justinia, 2024). Sistem pengendalian internal juga berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Semarang (Astuti & Prabowo, 2023).

Kecurangan (*Fraud*) adalah penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, baik secara individu maupun berkelompok untuk keuntungan pribadi dan/atau keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara menyembunyikan atau melalui rekayasa yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Larasati, dkk., 2017). Kasus *Fraud* telah terjadi di berbagai bidang, salah satunya termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di beberapa institusi pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa kasus korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan jenis korupsi terbesar kedua di Indonesia setelah kasus suap. Tindakan *Fraud* dijumpai pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, proses pengadaan, penyusunan kontrak, sampai dengan pelaksanaan kontrak (Wiharti & Novita, 2020).

Fenomena ini tentu harus disikapi dengan baik dan serius oleh pihak pemerintah karena *Fraud* terus menerus terjadi dan berulang kali (Rusliyawati, 2022). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu cara untuk mendeteksi terjadinya *Fraud* pada setiap organisasi sektor publik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah praktek *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah antara lain: penerapan *E-procurement*, akuntansi forensik dan audit investigasi serta sistem pengendalian internal.

E-procurement adalah pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik (PP No. 4 Tahun 2015). Akuntansi forensik adalah suatu keterampilan investigasi dan analitik yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum (Larasati, dkk., 2017). Audit investigasi merupakan kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu dengan periode yang tidak dibatasi dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang (Murwanto, dkk., 2012). Sedangkan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, pekerjaan, dan arus wewenang, orang-orang dan sistem informasi manajemen, yang dirancang untuk membantu organisasi tersebut mendukung tujuan atau sasaran tertentu (Joseph dkk., 2015).

Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh penerapan *E-procurement*, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud*. Atas dasar itulah penelitian ini diberi judul “Pengaruh Penerapan *E-procurement*, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Bandung”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan *Structural Equation Modeling (SEM)* melalui *Partial Least Square (PLS)*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa di 28 SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Inspektorat Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan kriterianya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, serah terima barang/jasa pengadaan hingga tahap evaluasi. Mereka adalah para pejabat yang

terlibat dalam pengadaan barang/jasa di 28 SKPD Pemerintah Kota Bandung masing-masing terdiri 5 orang dan seluruh pegawai di Inspektorat Wilayah Kota Bandung yang jumlahnya 30 orang. Total keseluruhan anggota populasi adalah 170 orang. Adapun sampel penelitiannya adalah 119 orang yang diambil dengan menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu sebanyak 89 orang diambil secara acak dari 28 SKPD di Pemerintah Kota Bandung dan 30 orang auditor di bidang investigasi pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681. Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 Bujur Timur dan 655' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan, Berikut Produk - Produk inovasi dan Prestasi dari Kota Bandung.

Visi dan Misi Kota Bandung adalah sebagai berikut:

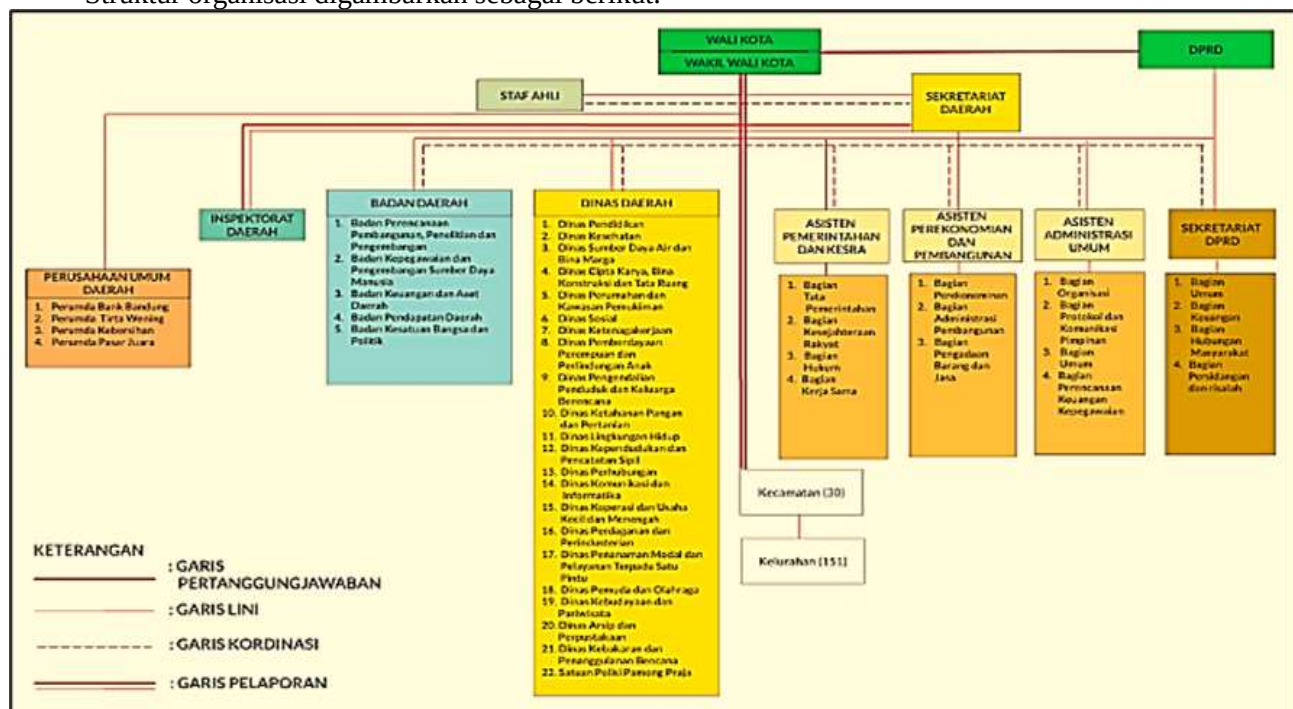
Visi

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”.

Misi

- Membangun masyarakat yang humanis, agamis, dan berdaya saing
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
- Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
- Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Hasil Penelitian

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas *Konvergen* yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada nilai *loading factor* Nilai *loading factor* harus berada di atas *rule of thumbs* 0,5.

Tabel 2. *Outer Loading Model PLS*

Variabel	Indikator/ Pernyataan	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule of Thumbs</i>	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (M)	M.01	0,790	0,5	Valid
	M.02	0,763	0,5	Valid
	M.03	0,777	0,5	Valid
	M.04	0,719	0,5	Valid
	M.05	0,719	0,5	Valid
$X_1 * M$		1,202	0,5	Valid
Penerapan <i>E-procurement</i> (X_1)	X1.01	0,732	0,5	Valid
	X1.02	0,789	0,5	Valid
	X1.03	0,743	0,5	Valid
	X1.04	0,707	0,5	Valid
	X1.05	0,744	0,5	Valid
	X1.06	0,747	0,5	Valid
	X1.07	0,795	0,5	Valid
	X1.08	0,778	0,5	Valid
	X1.09	0,700	0,5	Valid
$X_2 * M$		1,111	0,5	Valid
Akuntansi Forensik (X_2)	X2.01	0,868	0,5	Valid
	X2.02	0,798	0,5	Valid
	X2.03	0,785	0,5	Valid
	X2.04	0,734	0,5	Valid
$X_3 * M$		0,998	0,5	Valid
Audit Investigasi (X_3)	X3.01	0,823	0,5	Valid
	X3.02	0,729	0,5	Valid
	X3.03	0,731	0,5	Valid
	X3.04	0,792	0,5	Valid
	X3.05	0,825	0,5	Valid
	X3.06	0,738	0,5	Valid
	X3.07	0,724	0,5	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Y.01	0,816	0,5	Valid
	Y.02	0,793	0,5	Valid
	Y.03	0,774	0,5	Valid
	Y.04	0,816	0,5	Valid
	Y.05	0,783	0,5	Valid
	Y.06	0,853	0,5	Valid

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Tabel 3. Reliabilitas dan Validitas Konstruks (AVE)

Variabel Laten	AVE	<i>Rule of Thumbs</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-procurement</i> (X_1)	0,629	0,5	Support
Akuntansi Forensik (X_2)	0,624	0,5	Support
Audit Investigasi (X_3)	0,567	0,5	Support
Sistem Pengendalian Internal (M)	0,692	0,5	Support
<i>Moderating Effect</i> 1	1,000	0,5	Support
<i>Moderating Effect</i> 2	1,000	0,5	Support
<i>Moderating Effect</i> 3	1,000	0,5	Support
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,650	0,5	Support

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Nilai AVE semua variabel laten adalah lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan mampu digunakan untuk mewakili variabel laten yang dibangun oleh masing-masing indikator.

Uji Diskriminan

Pada penelitian ini, uji diskriminan menggunakan Fornell-Larcker Criterion, yaitu dengan membuat perbandingan nilai akar kuadrat dari AVE (*Average Variance Ectracted*) untuk setiap konstruknya dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Hasil dari validitas diskriminan dapat diketahui seberapa jauh konstruk laten benar benar berbeda dengan konstruk lainnya. Nilai validitas diskriminan yang tinggi

memberikan indikasi bahwa suatu konstruk adalah unik dan mampu menjelaskan fenomena yang diukur.
Berikut adalah hasil dari uji validitas diskriminan menggunakan analisis *Fornell-Larcker Criterion*:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

Variabel Laten	M	M*X ₁	M*X ₂	M*X ₃	X ₁	X ₂	X ₃	Y
M	0,831							
M*X ₁	0,415	1,000						
M*X ₂	0,057	0,105	1,000					
M*X ₃	0,048	0,388	0,527	1,000				
X ₁	0,143	0,563	0,024	0,215	0,793			
X ₂	0,128	0,022	0,240	0,076	0,104	0,790		
X ₃	0,106	0,179	0,068	0,071	0,102	0,591	0,753	
Y	0,191	0,052	0,171	0,111	0,318	0,575	0,590	0,806

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruknya lebih besar dari pada nilai korelasi antar konstruk (variabel laten) dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa syarat validitas diskriminan pada model menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* terpenuhi.

Koefisien Determinan (R²)

Nilai *R-Square* (R²) adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

Tabel 5. Nilai R² (*R-Square*)

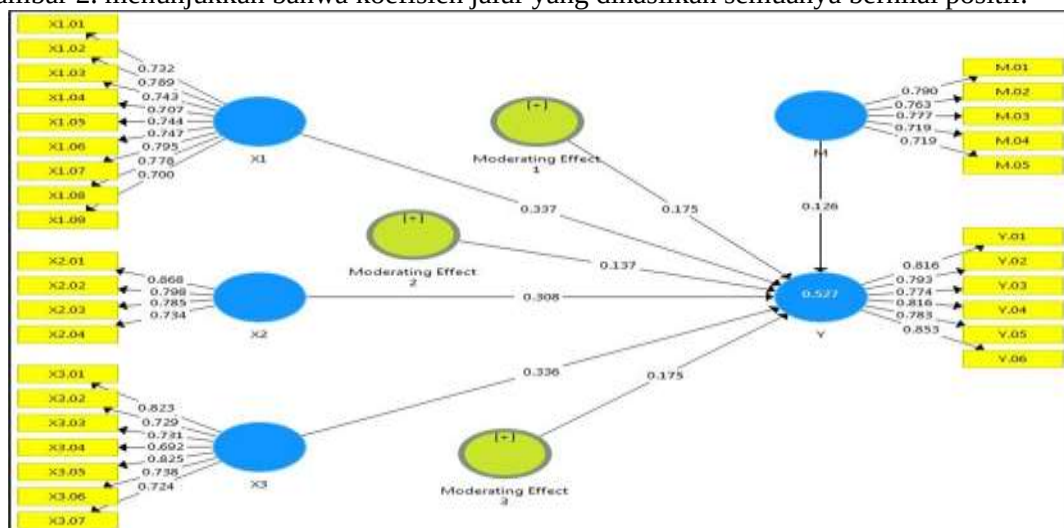
Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>	Indikasi Model
Partisipasi Publik (Y)	0,527	0,497	Moderate (Sedang)

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Nilai *R-Square* didapatkan untuk variabel Pencegahan *Fraud* (Y) adalah sebesar 0,527 (lebih besar dari 0,50) yang mengindikasikan bahwa model yang digunakan termasuk pada kategori moderate (sedang). Dengan demikian variabel Akuntabilitas Pemerintah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan *E-procurement* (X₁), Akuntansi Forensik (X₂), Audit Investigasi (X₃), dan Sistem Pengendalian Internal (M) dalam model sebesar 52,7% yang termasuk kategori moderate (sedang).

Analisis Pengaruh Langsung

Gambar 2. menunjukkan bahwa koefisien jalur yang dihasilkan semuanya bernilai positif.



Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Gambar 2. Hasil Kalkulasi Model SEM-PLS

Hasil analisis pengujian pengaruh langsung menggunakan algoritma PLS berdasarkan model penelitian yang dirancang sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Pengaruh Langsung

Path (Jalur)	Original Sample (Path)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
$X_1 \rightarrow Y$	0,337	3,111	0,004	Support
$X_2 \rightarrow Y$	0,308	3,040	0,009	Support
$X_3 \rightarrow Y$	0,336	3,999	0,000	Support

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Keterangan: X_1 (Penerapan *E-procurement*); X_2 (Akuntansi Forensik); X_3 (Audit Investigasi); M (Sistem Pengendalian Internal); dan Y (Pencegahan *Fraud*)

Semua jalur menunjukkan hubungan yang *Support* (positif). Artinya, hubungan antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogennya adalah searah (positif) dan dapat diterima.

Analisis Pengaruh Variabel Moderasi

Berikut adalah hasil analisis pengaruh variabel moderasi berdasarkan Diagram Jalur model yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan software SmartPLS.

Tabel 7. Hasil Analisis Pengaruh Variabel Moderasi

Path (Jalur)	Original Sample (Path)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
$M*X_1 \rightarrow Y$	0,175	2,728	0,006	Support
$M*X_2 \rightarrow Y$	0,137	3,441	0,001	Support
$M*X_3 \rightarrow Y$	0,175	2,816	0,005	Support

Sumber: Hasil SmartPLS Ver. 4.0

Keterangan: X_1 (Penerapan *E-procurement*); X_2 (Akuntansi Forensik); X_3 (Audit Investigasi); M (Sistem Pengendalian Internal); dan Y (Pencegahan *Fraud*)

Semua jalur tidak langsung menunjukkan hubungan yang *Support* (positif). Artinya, variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogennya.

Hasil analisis Structural Model, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1) Penerapan *E-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,111 dengan *p-value* sebesar 0,004. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud*; 2) Akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,040 dengan *p-value* sebesar 0,009. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud*; 3) Audit investigasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,999 dengan *p-value* sebesar 0,000. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud*; 4) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,728 dengan *p-value* sebesar 0,006. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud*; 5) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,441 dengan *p-value* sebesar 0,001. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud*; 6) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan audit investigatif terhadap pencegahan *Fraud* diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,816 dengan *p-value* sebesar 0,005. Nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yang menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan audit investigatif terhadap pencegahan *Fraud*.

Pembahasan

Penerapan *E-procurement* Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kecurangan atau *Fraud* merupakan tindakan yang dilakukan pada saat mengambil keputusan untuk diri pribadi maupun kelompok serta golongannya dengan cara-cara yang tidak jujur dan dapat merugikan

orang lain (Gaurina, dkk., 2017). *Fraud* banyak terjadi pada pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, dengan diterapkannya

E-procurement proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara (Chen et al., 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusni (2022) yang menyimpulkan bahwa implementasi *E-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Banggai. Begitu juga dengan penelitian Astuti & Prabowo (2023) yang menyimpulkan bahwa implementasi *E-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Semarang.

Kaitannya dengan kasus di Pemerintah Kota Bandung, penerapan *E-procurement* maka kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara fair. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya *Fraud*. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

Akuntansi Forensik Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*

Fraud adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja (Larasati, dkk., 2017). *Fraud* umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, menghindari pajak serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha (Sayyid, 2014). Hal inilah yang menjadikan *Fraud* menjadi objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik. Oleh karena itu, akuntansi forensik harus memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Claudia, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu, seperti penelitian Rani, dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa praktik akuntansi forensik mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Begitu juga dengan penelitian Prasetyo, dkk. (2023) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik dapat mendeteksi terjadinya *Fraud*. Kaitannya dengan kasus di Pemerintah Kota Bandung, akuntansi forensik dapat mengungkap berbagai upaya *Fraud* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya, dari hasil temuan tersebut digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan *Fraud* kedepannya. Selain itu, para pelaksana pengadaan barang/jasa akan semakin hati-hati dan waspada terhadap upaya *Fraud*. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

Audit Investigasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*

Wiralestari (2016) menjelaskan bahwa *Fraud* dapat sedini mungkin terdeteksi apabila pihak manajemen atau internal auditor jeli melihat tanda-tanda terjadinya *Fraud*. Hal tersebut dikarenakan terjadinya *Fraud* dalam berbagai kasus, termasuk dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun berkelompok yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya untuk keuntungan pribadi dan atau keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara menyembunyikan dalam atau melalui rekayasa yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dan salah satu upaya mengungkapkan kecurangan tersebut dilakukan audit investigatif. Dengan dilakukan audit investigatif akan semakin banyak temuan yang bisa menjadi memperkuat dan membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan temuan awal dugaan adanya *Fraud*. Hasil dari audit investigatif ini akan diindaklanjuti sebagai bukti atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu, seperti penelitian Ningrum, dkk. (2024) yang menyimpulkan banyak kasus *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan daerah, dan salah satu upaya untuk mengungkapkan adanya *Fraud* tersebut adalah melalui audit investigatif. Begitu juga dengan penelitian Ulfani & Ernawati (2024) bahwa dengan dilakukannya audit investigatif dapat mengungkap kasus *Fraud* yang terjadi di PT Waskita dan Wijaya Karya, perusahaan BUMN yang banyak menangani berbagai proyek pemerintah.

Kaitannya dengan kasus pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung, dilaksanakannya audit investigatif menjadi salah satu upaya untuk dilakukannya langkah-langkah tindak lanjut melalui proses hukum yang berlaku. Penerapan audit investigatif juga menjadi salah satu bentuk pencegahan dini agar

dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan kejujuran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian Internal Dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Salah satu upaya organisasi dalam mencegah terjadinya *Fraud* adalah melalui pembuatan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan jelas. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, meminimalisir potensi kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah munculnya kerugian aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi entitas pemerintah dan organisasi publik untuk terus mengembangkan dan memperkuat sistem pengendalian internal mereka sebagai bagian dari strategi pencegahan *Fraud* yang holistik (Rahmayanti, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pertemuan sebelumnya, seperti penelitian Yasni (2022) yang menyimpulkan bahwa sistem internal pemerintah memoderasi *e procurement* terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu juga dengan penelitian Khairunnah & Nadirsyah (2022) yang hasilnya bahwa *E-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif secara parsial terhadap pencegahan kecurangan pada instansi pemerintah di Provinsi Aceh.

Kaitannya dengan kasus di Pemerintah Kota Bandung, sistem pengendalian internal diterapkan sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan *E-procurement* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian internal, maka tahapan-tahapan *E-procurement* dilaksanakan dengan benar dan jelas. Hal tersebut akan mencegah terjadinya *Fraud*. Dengan demikian, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian Internal Dapat Memoderasi Pengaruh Akuntansi Forensik Terhadap Pencegahan *Fraud*

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, pekerjaan, dan arus wewenang, orang-orang dan sistem informasi manajemen, yang dirancang untuk membantu organisasi tersebut mendukung tujuan atau sasaran tertentu (Joseph dkk., 2015). Sistem pengendalian internal yang tepat dapat memperkuat peran akuntansi forensik dalam mendeteksi terjadinya *Fraud*. Akuntan forensik menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk membantu klien dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan (Ozili, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian, yaitu penelitian Yusni (2022) dan Astuti & Prabowo (2023) yang menjelaskan bahwa akuntansi forensik dapat mempengaruhi pencegahan *Fraud*. Sementara itu, pada penelitian Ainun & Justina (2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal juga mempengaruhi pencegahan *Fraud*.

Kaitannya dengan kasus pada Pemerintah Kota Bandung, penerapan sistem pengendalian internal menjadi salah satu upaya guna memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, akuntansi forensik menjadi penting sebagai instrumen pengendalian internal. Dengan demikian, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian Internal Dapat Memoderasi Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa dengan sistem pengendalian internal merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko penipuan dalam proses pengadaan dengan menerapkan kontrol internal yang kuat. Proses pengadaan barang dan jasa sering menjadi sasaran potensial untuk praktik penipuan karena melibatkan transaksi yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif guna mengurangi risiko tersebut. Sistem pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan mekanisme kontrol yang dirancang untuk mengamankan aset organisasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengidentifikasi dan mencegah potensi *Fraud* (Rahmayanti, 2023).

Salah satu aspek dalam sistem pengendalian internal adalah pelaksanaan audit investigasi. Audit investigasi yang dilakukan dengan tepat dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan menanggulangi kasus-kasus *Fraud*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk melakukan audit investigasi secara teratur sebagai bagian dari upaya mereka untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa (Yulistianingsih et al, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Ningrum, dkk. (2024) dan penelitian Ulfani & Ernawati (2024) menyimpulkan bahwa audit investigatif dapat mempengaruhi pencegahan *Fraud*. Sementara itu, pada penelitian Ainun & Justina (2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal juga mempengaruhi pencegahan *Fraud*.

Kaitannya dengan kasus pada Pemerintah Kota Bandung, sistem pengendalian internal menjadi salah satu upaya guna memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, audit investigasi merupakan salah satu faktor dari pengendalian internal. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, pada berikut adalah kesimpulannya: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung; 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung; 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan positif dan signifikan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung; 4) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan penerapan *E-procurement* terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung; dan 5) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung; 6) Sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan audit investigasi terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut disampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung: 1) Pemerintah Kota Bandung hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pasca lelang. Salah satunya adalah melalui penerapan aturan secara konsisten; 2) Pemerintah Kota Bandung hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup penugasan. Salah satunya adalah melalui pemberian job description para responden yang jelas dan terukur; 3) Pemerintah Kota Bandung hendaknya menindaklanjuti temuan apabila telah ditemukan 2 (dua) alat bukti; 4) Pemerintah Kota Bandung hendaknya memilih para pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki etika, komitmen, dan integritas melalui seleksi yang ketat; dan 5) Pemerintah Kota Bandung hendaknya membuat kebijakan agar dalam pencegahan *Fraud* harus dikonfirmasi. Hal tersebut dimaksudkan guna menghindari kesalahan dalam penanganan.

DAFTAR REFERENSI

- ACFE (Association of Certified *Fraud* Examiniers). (2020). Report to the Nation (RTTN)
- Ainun, M. D. M. & Justina, C. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Telkom Corporate University). *Brainy*, 5(1), 40-50
- Alamsyahbana, M. I., Zulfachri, B., Zulaika, N., Sitepu, A. P., & Munaf, T. (2022). Analisis Penerapan SPI Dan Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pendeteksian *Fraud* Secara Dini. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1343. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.1343-1356.2022>
- Arens, A.A., Elder, R.J. & Beasley, M.S. (2014). *Auditing and Assurance Service*. Jakarta: Erlangga
- Astuti, E. & Prabowo, T.J.W. (2023). Pengaruh implementasi *E-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1-12
- Chen, Y., Bretschneider, S., Stritch, J. M., Darnall, N., & Hsueh, L. (2022). *E-procurement* system adoption in local governments: the role of procurement complexity and organizational structure. *Public Management Review*, 24(6). <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1874497>
- Claudia, G. (2018). Akuntansi forensik untuk bedah kasus korupsi. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 95-109, <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1586>
- Gaurina, N.P.M., Purnamawati, I.G.A. & Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan whistleblowing system terhadap pencegahan *Fraud* (studi kasus pada Bali Hai

- Cruises). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2), 24-35, <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10450>
- Joseph, O.N., Albert, O. & Byaruhanga, J. (2015). Effect of internal control on *Fraud* detection and prevention in District Treasuries of Kakamega County. International Journal of Business and Management Invention, 4(1), 47–57, <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.1301387.V1>
- Khairunnah, I & Nadirsyah. (2022). Pengaruh penerapan *E-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 7(4), 578-594, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21014>
- Larasati, Y.S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE), 3(2), 43–60, <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.759>
- Munadi, F., dkk. (2022). *Fraud* Pemerintah Aceh: Apa Penyebabnya? Jurnal Kajian Akuntansi, 6(2), 244-262, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Murwanto, R., Budiarmo, A. & Ramadhana, F.H. (2012). Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta: LPKP-AP, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Ningrum, A. S., Numagap, N. S. H. & Muchdar, N. M. (2024). Analisis Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud*. JREA: Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 2(2), 326-338, DOI : <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1945>
- Ozili, P. K. (2020). Advances and Issues in *Fraud* Research: A Commentary. Journal of Financial Crime, 27(1). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3132210>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Prasetyo, Y., dkk. (2023). Integrasi Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Mendeteksi *Fraud*: Studi Literatur. Jurnal Buana Akuntansi, 8(1), 16-29, DOI: 10.36805/akuntansi.v8i1.3062
- Rahmayanti, S., Sari, Y. & Periansya. (2022). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pendeteksian *Fraud*. JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(2), 1-11, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Rani, A. S., Maharani, R. A., Machdar, N. M. (2024). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Serta Mengevaluasi Proses Pengungkapan Tindak Pidana *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 3(3), 187-194, DOI: <https://doi.org/10.30640/inisiatif/v3i3.2646>
- Rusliyawati. (2022). Motivasi Melakukan *Fraud* Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. ABDI EQUATOR, 2(2), 80-91, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- Safitri, R. H., dkk. (2024). Pengaruh *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(3), 2580-2590, DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2092>
- Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan *Fraud* dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 13(2), 137-162, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Singh, P. K., Ismail, F. B., Wei, C. S., Imran, M., & Ahmed, S. A. (2020). A framework of EProcurement technology for sustainable procurement in ISO 14001 certified firms in Malaysia. Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 5(4). <https://doi.org/10.25046/AJ050450>
- Sorunke, O. A. (2016). Personal Ethics and *Fraudster* Motivation: The Missing Link in *Fraud* Triangle and *Fraud* Diamond Theories. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(2), 159-165. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v6-i2/2020>
- Tuanakotta, T.M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat
- Ulfani, A. & Ernawati. (2024). Studi Literatur : Pengaruh Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud* Pada Perusahaan Waskita Karya Tbk Dan Wijaya Karya Tbk. Fusion Multidisciplinary Journal, 2(1), 158-172
- Wiharti, R.R. & Novita. (2020). Dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *Fraud* pengadaan barang/jasa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10(2), 115-125, <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wiralestari. (2016). *Fraud*: akuntansi forensik dan audit investigatif. Media Riset Akuntansi, 6(1), 43-59.
- Yuilistianingsih, A. R. D., dkk. (2020). Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi *Fraud* Dan Korupsi Di

Lembaga Pemerintahan. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 135-146, DOI: <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.18290>

Yusni. (2022). Pengaruh implementasi *E-procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang/jasa dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 5(2), 138-148, <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>.